

Pengaruh Gender dan Dukungan Politik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

The Influence of Gender and Political Support on Local Government Performance

Fadillah Ahmad Fauzi Pratama¹, Doddy Setiawan²

^{1,2}Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email: fafafauzi69@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana gender dan dukungan politik mempengaruhi kinerja pemerintah daerah di Pulau Jawa. Studi ini didasarkan pada teori agensi. Penelitian ini juga menguji beberapa variabel kontrol terkait karakteristik pemerintah daerah seperti ukuran pemerintah daerah, belanja modal, dan tingkat kekayaan daerah. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari semua kabupaten/kota di Pulau Jawa, yaitu 113 kabupaten/kota, dan periode observasi adalah dari tahun 2016 hingga 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh gender dan dukungan politik. Studi ini juga melakukan pengujian lebih lanjut seperti analisis terhadap wilayah non-pemekaran, yang menghasilkan hasil yang konsisten.

Kata Kunci: gender; pemerintah daerah; kinerja; dukungan politik

ABSTRACT

This study aims to investigate how gender and political support influence the performance of local governments in Java. This study is based on public policy theory. This study also examines several control variables related to regional characteristics such as local government size, capital expenditure, and regional wealth levels. The sample in this study consisted of all regencies/cities in Java, namely 113 regencies/cities, and the observation period was from 2016 to 2018. The results of this study indicate that local government performance is influenced by gender and political support. This study also conducted further tests such as analysis of non-expansion areas, which yielded consistent results.

Keywords: gender; local government; performance; political support

PENDAHULUAN

Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yang dimulai sejak era reformasi, menandai langkah awal demokratisasi dengan transfer kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah. Tujuan utama otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, adalah meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, selaras dengan tujuan nasional. Namun, terdapat kendala dalam mewujudkan desentralisasi ini. Banyak daerah belum mampu memenuhi kebutuhan operasionalnya hanya dari pendapatan asli daerah (PAD), sehingga masih bergantung pada dana transfer dari pusat. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah semakin penting dan diperlukan

sistem pemantauan, evaluasi, dan pengukuran kinerja yang terstruktur. Hal ini untuk memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Kinerja sendiri menjadi tolak ukur dalam keberhasilan desentralisasi itu sendiri. Pada sektor bisnis kinerja juga menjadi indikator kesehatan suatu organisasi serta keberlangsungan organisasi itu sendiri. Ketika sebuah organisasi memiliki manajemen yang efektif serta mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan efisien dapat dikatakan organisasi tersebut memiliki kinerja yang bagus (Widagdo & Munir, 2017). Hal ini pula sesuai dengan pernyataan dari (Greiling, 2005) dimana menjelaskan yang menjadi kunci utama dalam pembaharuan di sektor publik adalah pengukuran kinerja itu sendiri. Pengukuran kinerja juga akan mendorong transparansi, insentif untuk kinerja, serta akuntabilitas. Sejak tahun 1999 ketika Presiden BJ Habibie menyetujui Instruksi Presiden terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mulai sejak itu pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap pelaporan kinerja. (Nugroho & Prasetyo, 2018) menyebutkan pula bahwa pengukuran kinerja menjadi hal penting.

Melalui Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemerintah Indonesia bertujuan untuk menciptakan kondisi yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki, sehingga setiap individu dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan nasional (Biduri & Dewi, 2022). Di Indonesia sendiri meskipun perempuan masih kurang terwakili terutama dalam menjadi kepala daerah, telah terjadi peningkatan perempuan yang mengambil peran menjadi kepala daerah (Dewi, 2012). Dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 kepala dan wakil daerah yang terpilih dari total 324 hanya 31 perempuan atau hanya sekitar 9,06%. Hal ini juga dialami pada pemilihan kepala daerah periode sebelumnya, pada tahun 2015 sebesar 8,7% bahkan di tahun 2017 kepala dan wakil daerah perempuan yang terpilih hanya sebesar 5,9%. (Chattopadhyay & Duflo, 2004) menyebutkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam politik di desa-desa India menghasilkan peningkatan yang signifikan yang besar dalam pengeluaran seperti investasi publik untuk menyediakan air bersih. (Ferreira & Gyourko, 2014) juga berpendapat ketika perempuan diberdayakan secara politik mempengaruhi relevansi gender terhadap kebijakan dan hasil politik.

Terpilihnya seorang kepala daerah juga tidak lepas dari peranan dukungan partai politik yang dimilikinya. Organisasi partai politik dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia yang memiliki kemauan dan cita-cita yang sama untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Partai politik sendiri juga sering dikaitkan dengan Kelompok kepentingan maupun Kelompok penekan (Tavares & da Cruz, 2017). Oleh karena itu dukungan partai politik yang diperoleh kepala daerah juga akan mempengaruhi perihal motivasi serta kebijakan yang dibuat dalam menjalankan pemerintah daerahnya. Tentunya dengan semakin tingginya dukungan politik yang dimiliki kepala daerah maka seorang kepala daerah memiliki tanggungjawab dalam menjalankan kinerjanya, karena hasil kinerja yang dihasilkan oleh kepala daerah akan menjadi patokan bagi masyarakat dalam menilai dan menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan umum periode selanjutnya.

Banyak peneliti sebelumnya yang membahas gender dan dukungan politik dilakukan, keberadaan perempuan di level manajemen tertinggi memiliki dampak positif, antara lain; (Huang, 2013), (Peni, 2014), dan (Liu et al., 2014), namun ada penelitian juga yang memiliki pendapat yang berbeda Ellwood & Garcialacalle (2015), dan (Lam et al., 2013) menjelaskan bahwa keberadaan perempuan di dalam level manajemen tertinggi justru malah memberikan dampak negatif, pada penelitian sektor publik di Indonesia sendiri juga gender dikaitkan dengan kinerja (Pahlevi & Setiawan, 2017) dimana gender mempengaruhi kinerja, keputusan pengungkapan kecurangan (Sarni et al., 2020), pencegahan korupsi (Mahardika, 2023). Kemudian penelitian terkait gender juga dilakukan di beberapa negara seperti Spanyol yang dilakukan oleh (Araujo-Tejedo-Romro,

2018) yang mengkaitkan antara gender dengan tingkat transparansi pemerintah daerah, selanjutnya di negara swedia (Backhans et al., 2007) mengkaitkan antara kehadiran gender dalam pemerintah daerah dengan tingkat kesehatan, dimana menunjukkan hasil bahwa gender memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kesehatan.

Kemudian terkait dukungan politik penelitian yang dilakukan (Krah & Metens, 2020) melakukan penelitian terkait demokrasi dengan transparansi keuangan pemerintah daerah Ghana menyebutkan bahwa ketika sebuah pemerintah daerah memiliki dukungan politik dan mampu memberikan transparansi yang baik maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mengurangi resiko korupsi. Namun penelitian yang dilakukan (Araujo & Tejedo-Romero, 2016), memiliki pendapat sebaliknya bahwa dukungan politik tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan (Putri, 2018) menyebutkan bahwa dukungan politik kepala daerah tidak berpengaruh terhadap budget forecast errors atau kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah. Penelitian terdahulu menguji antara pengaruh gender dan dukungan politik terhadap kinerja pemerintah daerah dilakukan secara terpisah, Namun dalam penelitian ini mengkombinasikan dua latar belakang antara individu (gender) dan politik (dukungan politik). Tuntutan peningkatan kinerja bagi pemerintah daerah yang semakin tinggi dan timbulnya hasil yang beragam dari penelitian-penelitian terdahulu memicu penulis untuk mengetahui apakah karakteristik kepala daerah mempengaruhi terhadap kinerja pemerintah daerah di Pulau Jawa dengan tahun anggaran 2016-2018. Karakteristik kepala daerah yang akan dibahas dalam penelitian ini terdiri dari latar belakang individu (gender) dan latar belakang politik (dukungan politik).

LANDASAN TEORI

Teori Agensi

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara principal (pemberi kuasa) dan agen (penerima kuasa) (Halim & Abdullah, 2006). Agency problem ada disaat principal memberikan kewenangan kepada agen untuk bertindak atas nama mereka dan memenuhi tujuan tertentu (Zimmerman 1977). Teori keagenan berasumsi bahwa pemerintah daerah (agen), yang bertindak atas nama masyarakat (principal), memiliki potensi untuk bertindak demi kepentingan diri mereka sendiri, bukan demi kepentingan terbaik masyarakat. Hal ini didasari oleh asumsi asimetri informasi, di mana agen memiliki akses informasi yang lebih besar daripada principal. Potensi konflik kepentingan ini dapat menimbulkan penyimpangan atau korupsi oleh agen. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah dapat menjadi mekanisme checks and balances yang efektif untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah daerah (agen) dan masyarakat (principal).

Gender

Dalam penelitian ini karakteristik kepala daerah dibagi menjadi dua yaitu latar belakang individu serta latar belakang politik dimana latar belakang individu meliputi gender, dan latar belakang politik meliputi dukungan politik. (Hambrick & Mason, 1984) menjelaskan bahwa semua keputusan perusahaan dan kinerjanya dipengaruhi oleh karakteristik manajer puncak. Karakteristik individu termasuk: usia, tingkat pendidikan, masa kerja, dan gender semua menghubungkan karakteristik ini dengan kinerja organisasi (Hambrick, 1984). Kajian ini menunjukkan bahwa karakteristik kepala daerah berperan penting dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintahan daerah, walikota/ bupati memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan daerah. (Finkelstein & Hambrick, 1990) berpendapat bahwa umur gender, latar belakang

Pendidikan, dan lama jabatan berpengaruh terhadap output perusahaan. Dalam penelitian ini karakteristik kepala daerah yang akan dibahas adalah gender.

Dukungan Politik

Latar belakang politik adalah latar belakang seseorang yang aktif dalam politik. Dukungan adalah bentuk perhatian berupa bantuan moril dan material. Dukungan politik menggambarkan sejauh mana kepala daerah mendapat dukungan atau bantuan dari partai politik lain dalam bentuk koalisi. Singkatnya, pengertian dukungan politik adalah perhatian dan dukungan partai politik yang mendukung kandidat dalam pemilihan dalam bentuk moralitas dan tindakan dalam bentuk koalisi. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 menyatakan bahwa DPRD, yang disebut DPRD di tingkat regional, terdiri dari anggota partai politik yang terpilih melalui pemilihan umum. Setiap daerah memiliki DPRD di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten dengan fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan. Koalisi yang mendukung kepala daerah terpilih dalam kursi legislatif menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) (Sitepu, 2016), (Widyaningrum, Setiawan, & Brahmana, 2019). Anggaran-anggaran ini merupakan alat kebijakan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan sebuah pemerintah daerah sendiri dalam mengukur kinerjanya perlu dilakukannya evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (Pahlevi & Setiawan, 2017). Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur dalam PP No 6/2008 dimana dijelaskan pula bahwa model dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah I-O-O (Input-Outputs-Outcomes). Akan tetapi kinerja yang dimiliki tiap daerah tentunya berbeda hal ini pula disebabkan karakteristik daerah yang berbeda tentunya kebijakan kebijakan yang dihasilkan tiap daerah juga berbeda. EKPPD merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Permendagri No. 73 dan 74 Tahun 2009. Dalam proses EKPPD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) digunakan sebagai sumber informasi utama. Penyelenggaraan kebijakan menjadi fokus utama evaluasi ini, dengan peran penting yang dimainkan oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah dan DPRD.. Keduanya bertanggung jawab atas pengawasan fungsional dan legislatif di wilayah tersebut sesuai dengan peraturan seperti PP No. 20 tahun 2001 dan Kepri No. 74 tahun 2001).

Seperti yang telah diatur Permendagri 73 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah diukur melalui enam tolok ukur, yaitu masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.. Untuk mengetahui berhasil tidaknya pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintah daerah maka pemerintah perlu mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2008. Tujuan EPPD adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara sistematis (EKPPD), kecakapan menerapkan otonomi daerah (EKPOD), serta keutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baru terbentuk (EDOB). Mulai dari EKPPD, EKPOD, dan EDOB memiliki aspek penilaian yang berbeda satu sama lain. Untuk EKPPD sendiri diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan kinerja berdasarkan prinsip good governance, tentunya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi sumber utama dalam memberikan sebuah penilaian terhadap suatu daerah.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Dukungan Politik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

DPRD sendiri memiliki peran legislasi, penganggaran, serta pengawasan hal ini diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan tata pemerintahan peranan pengawasan yang ditugaskan pada DPRD merupakan suatu hal yang penting. Ketika pengawasan yang dilakukan dari DPRD meningkat diharapkan pula mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan kata lain semakin tinggi dukungan partai politik yang diperoleh seorang kepala daerah mampu meminimalisir konflik keagenan dengan pihak DPRD sebagai prinsipal. Pernyataan tersebut juga dijelaskan dalam penelitian (Widagdo & Munir, 2017) dimana semakin besarnya jumlah kursi parpol yang mengusung pencalonan kepala daerah maka semakin kecil celah akan terjadinya potensi konflik, tentunya hal ini dapat mempermudah seorang kepala daerah dalam menyusun strateginya untuk mewujudkan kemajuan di daerahnya masing-masing seperti menyusun kebijakan APBD termasuk alokasi anggaran wajib yang mana memiliki peran penting dalam pelaksanaan operasional suatu daerah. tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan (Tavares & da Cruz, 2017) meneliti tentang pengaruh dukungan politik terhadap tingkat pengungkapan beranggapan bahwa ketika sebuah kepala daerah yang terpilih berasal dari partai mayoritas maka kepala daerah tersebut berusaha untuk melakukan pengungkapan seluruh pengelolaan pemerintahnya, karena memiliki tekanan dari lawan politik maupun masyarakat. Berdasarkan paparan diatas maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut ini:

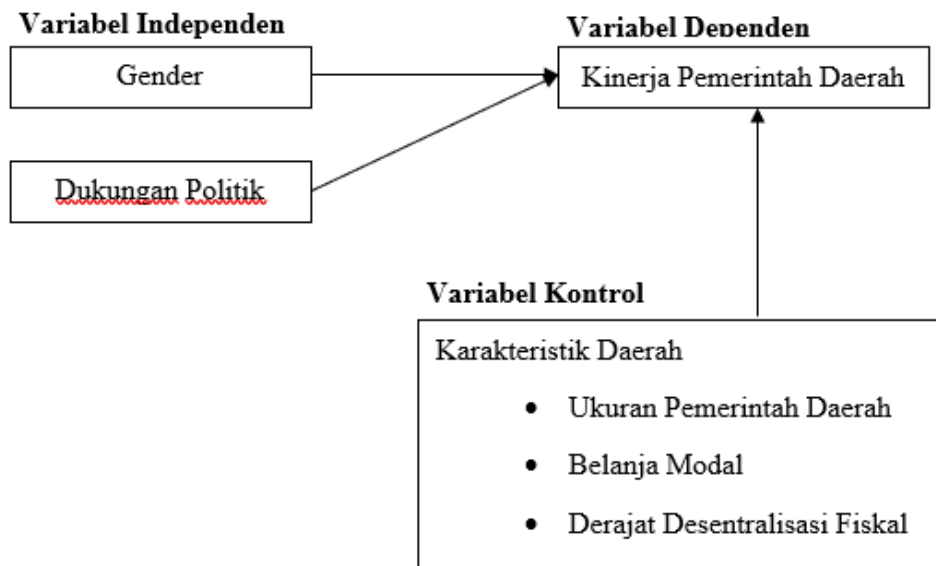
H₁: Dukungan Politik memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengaruh Gender terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Sejak pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung partisipasi perempuan yang terpilih menjadi kepala daerah meningkat (Dewi, 2012). Dapat dijelaskan bahwa perempuan di Indonesia mau mengambil bagian dalam pemilihan kepala daerah. Dimana ini menjadi sinyal positif bagi demokrasi di Indonesia. Walaupun kehadirannya masih minoritas namun perihal kinerja kepala daerah perempuan mampu memberikan hal positif. (Hambrick & Mason, 1984) dalam penelitiannya menyatakan bahwasanya gender merupakan faktor demografi yang dapat mempengaruhi kebijakan dan strategi perusahaan. Laki laki dan perempuan sendiri memiliki perbedaan dalam memproses sebuah informasi, dimana perempuan lebih teliti di dalam memproses sebuah informasi (Mayers-Levi & Maheswaran, 1991). Dalam penelitian (Fereira & Gyourko, 2014) menyebutkan bahwa walikota di Amerika Serikat yang memiliki gender perempuan memiliki keterampilan politik yang lebih handal dibandingkan laki-laki. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian (Pahlevi & Setiawan, 2017) menjelaskan bahwa laki-laki memiliki kinerja yang lebih buruk dibandingkan perempuan. Berdasarkan penjabaran diatas maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut ini:

H₂: Kepala daerah perempuan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan sejawat lak-laki

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh gender dan dukungan politik terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Karakteristik Pemerintah Daerah yang digambarkan menggunakan Ukuran pemerintah daerah, belanja modal, dan tingkat kekayaan daerah sebagai variable kontrol, sedangkan kinerja pemerintah daerah diukur dengan menggunakan skor Indeks Kinerja yang dikeluarkan Kemendagri RI. Berikut ilustrasi dari kerangka berpikir berdasarkan uraian di atas.



Gambar 1. Kerangka Teoritis

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Hypothesis testing merupakan tujuan dalam penelitian ini, yang terdiri dari pengaruh gender dan pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah di Pulau Jawa. Ukuran pemerintah daerah, proposi belanja modal, serta tingkat kekayaan daerah menjadi variabel kontrol. Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan proksi untuk kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini berfokus pada kinerja pemerintah daerah di Pulau Jawa tahun 2016-2018.

Data sekunder merupakan jenis data yang dipakai dalam penelitian ini. Data yang sudah tersaji yang menyebabkan peneliti tidak perlu mengumpulkan data sendiri merupakan definisi dari data sekunder. Dalam penelitian ini, memperoleh data dari pusat informasi dan komunikasi BPK Republik Indonesia yang terdiri dari data ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, dan belanja modal. Serta website baik dari pemerintah daerah, situs web ensiklopedia daring bebas, dan website berita yang menyediakan data dan informasi terkait gender kepala daerah dan jumlah kursi yang diperoleh oleh partai yang mengusung kepala daerah terpilih. Data penilaian kinerja pengelola pemerintah daerah kabupaten/kota diambil dari hasil Evaluasi Kinerja Pengelola Pemerintah Daerah (EKPPD) LPPD tahun anggaran 2016-2018 yang dapat diakses melalui website <https://www.kemendagri.id/>.

Pemerintah Daerah di Pulau Jawa tahun 2016- 2018 yang dipakai untuk penelitian ini sebagai populasi, dikarenakan Pulau Jawa menjadi pilihan tepat untuk penelitian sektor publik karena konsentrasi penduduk dan aparatur negara yang tinggi, sentralisasi kebijakan dan ekonomi, kompleksitas dan variasi masyarakat, infrastruktur yang memadai, serta potensi dampak penelitian yang lebih relevan secara nasional (Cohen dan Leventis 2013; Heriningsih dan Marita 2013). Dalam pengumpulan sampel memakai teknik purposive sampling. Kriteria pengambilan sampel antara lain: (1) Pemerintah Daerah di Pulau Jawa tahun 2016- 2018, (2) Pemerintah Daerah di Pulau Jawa yang sudah Menyusun laporan keuangan tahun 2016- 2018, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), (3) Pemerintah Daerah yang mengutarakan informasi dalam LKPD auditan yang digunakan dalam penelitian, (4) Pemerintah Daerah yang data dan informasi terkait karakteristik kepala daerah

secara lengkap dapat ditelusuri, dan (5) Pemerintah Daerah yang memiliki skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan dapat di akses pada website Kemendagri.

Skor EKPPD Daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2016-2018 menjadi data yang akan dipakai dalam penelitian ini yang mana diperoleh dari website Kemendagri, data terkait dukungan partai politik diperoleh dari website Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat dan website KPU setiap kabupaten dan kota di Pulau Jawa, serta data terkait gender kepala daerah yang didapatkan dari website pemerintah daerah, situs web ensiklopedia daring bebas, dan website berita. Kemudian adanya kriteria tertentu pula yang disusun untuk memilih sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Tabel 1 merupakan jumlah sampel yang akan digunakan setelah dilakukannya seleksi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Tabel 1. Hasil Pemilihan Sampel

No	Variabel	Jumlah
1	Jumlah pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2016- 2018	113
2	Pemerintah daerah yang data informasi karakteristik kepala daerah tidak lengkap	(1)
3	Jumlah sampel kabupaten/kota	112
4	Periode pengamatan penelitian	3
5	Pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa 2016-2018	336
6	Data Outlier	(6)
Pemerintah kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian		330

Metode Analisis dan Hipotesis Penelitian

Teknik analisis yang dipakai pada penelitian ini yaitu regresi linear berganda dan menggunakan aplikasi Eviews 12, dikarenakan penelitian ini menggunakan data panel sebelum dilakukan pengujian hipotesis dilakukan uji pemilihan model.. Persamaan untuk uji hipotesis yaitu. $KP = \alpha + \beta_1 DP + \beta_2 GENDER + \beta_3 SIZE + \beta_4 Bel + \beta_5 TKD + \epsilon$
 KP = Kinerja Pemerintah Daerah , DP = Dukungan Politik, GENDER = Gender Kepala Daerah, SIZE = Ukuran Pemerintah Daerah, Bel = Belanja Modal, TKD = Tingkat Kekayaan Daerah.

Operasional Variabel Penelitian

Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Kinerja Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Dimana kinerja sendiri merupakan Patokan dari berhasil atau tidaknya sebuah upaya dalam mewujudkan visi, dan misi suatu organisasi. Sesuai dengan PP No 6 Tahun 2008 yang berisikan tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diukur berdasarkan masukan, proses, keluaran, hasil, dampak dan manfaat. Kinerja pemerintah dalam penelitian ini mengacu pada model I-O-O (Inputs-Outputs-Outcomes) (Walker & Andrewss, 2015). Model ini dalam melakukan penilaian terkait pencapaian pemerintah daerah melibatkan unsur masukan, luaran, serta hasil. Variabel kinerja pemerintah daerah diprosikan menggunakan dengan indeks (skor) SK Kemendagri RI terkait penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggara pemerintah daerah. Rincian dari skor indeks kinerja yang dikeluarkan Kemendagri RI terdiri dari nilai sangat tinggi memiliki rentang skor 3-4, nilai tinggi ditandai dengan skor 2-2,9, untuk nilai sedang memiliki rentang skor 1-1,9, dan nilai rendah ditandai dengan skor 0-0,9 (Pahlevi & Setiawan, 2017).

Dukungan Politik (X₁)

Dukungan Politik sendiri menunjukkan bahwa sebuah kepala daerah memiliki dukungan dari luar partai atau yang biasa disebut dengan koalisi

partai. Dukungan politik sendiri dilihat dari besaran jumlah kursi anggota dewan pendukung (Widagdo & Munir, 2017). Dalam penelitian ini memproksikan dukungan politik menggunakan jumlah anggota dewan pendukung dibandingkan dengan total jumlah anggota dewan.

Gender (X_2)

Gender merupakan elemen yang sudah melekat ketika lahir. Dengan keberadaan gender di dunia ini hanya ada laki-laki dan perempuan. Gender dalam studi ini diukur menggunakan variabel dummy. Indikator dari variabel ini adalah "1" bagi kepala daerah laki-laki dan "0" bagi kepala daerah perempuan. Riset yang ada menunjukkan bahwa pria dan wanita secara konstan memiliki perbedaan dalam cara mereka menangani pesan / informasi (Mayers-Levi & Maheswaran 1991).

Variabel Kontrol

Total asset yang tertera pada neraca laporan keuangan yang dijadikan sebagai ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini. Nilai total aset memiliki nilai yang tidak labil dibandingkan patokan yang lain, hal tersebut menjadi alasan dalam memilih total aset sebagai ukuran dari pemerintah daerah. Penelitian ini memakai logaritma natural (Ln) dari total aset (Azzahra & Wibowo, 2019), logaritma natural sendiri berguna dalam penelitian untuk mengukur variabel karena dapat membantu menangani distribusi data yang tidak linier, menstabilkan varians, menginterpretasikan elastisitas, memudahkan perbandingan, dan memenuhi asumsi model statistik. Standar belanja modal mencakup pengeluaran untuk akuisisi tanah, gedung, peralatan, dan aset tak berwujud. Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian lain yang menggunakan rasio antara total belanja modal dengan total belanja (Qoriba & Aswar, 2021) sebagai indikator belanja modal. PAD sendiri merupakan pendapatan yang didapatkan dari dalam daerahnya sendiri meliputi pajak dan retribusi daerah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Qoriba & Aswar, 2021) yang mana tingkat kekayaan daerah sendiri diproksikan dengan membandingkan antara PAD dan total pendapatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Untuk mengetahui ukuran sampel yang dipakai dalam pengujian regresi, diikuti dengan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari data penelitian maka dilakukan pengujian statistik deskriptif. Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif.

Tabel 2. Statistika Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
KP	330	2,5236	3,5922	3,2242	0,1937
DP	330	0	1	0,4127	0,2163
GENDER	330	0	1	0,7727	0,4197
SIZE	330	1570*	42764*	3686*	0,8206
BEL	330	0.09	0.37	0,1955	0,0521
TKD	330	0,03	0,64	0,1986	0,1033

Ket: *) Dalam Miliar Rupiah. KP = Kinerja Pemerintah Daerah Skor EKPPD; DP = Dukungan Politik, jumlah anggota dewan pendukung dibagi dengan total jumlah anggota dewan; GENDER = Gender Kepala Daerah, SIZE = Ukuran Pemerintah Daerah, Ln dari total aset; Bel = Belanja Modal, skala antara jumlah belanja modal dan total belanja; TKD = Tingkat Kekayaan Daerah, skala antara PAD dan total pendapatan.

Dari Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa, Skor EKPPD menunjukkan hasil rata-rata sebesar 3,2242 dan skor tertinggi dengan nilai sebesar 3,5922 adalah ada pada Kabupaten Tulungagung tahun 2016 dan skor terendah dengan nilai sebesar 2,5236 ada pada Kabupaten Kebumen tahun 2017, dengan standar deviasi 0,1937. Dukungan partai politik yang diperoleh kepala daerah di Pulau Jawa pada tahun 2016-2018 memiliki rata-rata sebesar 0,4127, sementara dukungan partai politik terbanyak diperoleh beberapa daerah hal disebabkan dikarenakan kepala daerah tersebut merupakan pasangan tunggal dalam pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan. Kemudian untuk dukungan partai politik terendah juga dimiliki beberapa kota/ kabupaten hal ini disebabkan karena kepala daerah tersebut berstatus Independen, dengan standar deviasi 0,2163. Gender kepala daerah di Pulau Jawa memiliki nilai rata-rata sebesar 0,7727 yang dapat disimpulkan bahwa kepala daerah dengan gender laki-laki mendominasi sebesar 77,27% dari jumlah sampel dalam penelitian ini, sedangkan kepala daerah dengan gender perempuan hanya sebesar 23,73%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kepala daerah di Pulau Jawa dari tahun 2016-2018 memiliki porsi yang hampir seimbang antara kepala daerah perempuan dan laki-laki, dengan standar deviasi sebesar 0,2902.

Ukuran pemerintah yang pengukurannya menggunakan total asset menunjukkan Rp 3.686.847.348.027,67 sebagai rata-rata dan ukuran pemerintah tertinggi dengan jumlah total aset sebesar Rp 42.764.672.922.352,53 adalah Kota Surabaya pada tahun 2018 dan ukuran pemerintah terendah dengan jumlah total aset sebesar Rp 1.570.786.523.172,07 adalah Kota Banjar pada tahun 2017. Rasio belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa sendiri hanya memiliki skor 0,1955 sebagai rata-rata dan rasio belanja modal tertinggi dengan 0,37 adalah Kota Depok tahun 2016 dan rasio belanja modal terendah dengan 0,09 adalah Kabupaten Kuningan Pada tahun 2018, dengan standar deviasi sebesar 0,0521. Kemudian untuk tingkat kekayaan daerah di Pulau Jawa memiliki skor 0,1986 sebagai rata-rata sedangkan untuk nilai tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya tahun 2017 yang memiliki skor 0,64. Untuk skor terendah pada tingkat kekayaan daerah ini dimiliki oleh Kabupaten Tegal tahun 2016 dengan skor 0,03, dengan standar deviasi 0,1033.

Selanjutnya dilaksanakan penentuan model estimasi data hal ini bertujuan untuk menentukan model mana yang akan dipakai dalam uji hipotesis. fixed effect model merupakan model yang lebih bagus daripada common effect model setelah dilaksanakan Uji Chow. Berikutnya dilaksanakan uji Kembali antara fixed effect dan random effect menggunakan Uji Hausman. Random effect model merupakan metode yang dipakai dalam pengujian regresi data panel. Table 3 menjelaskan hasil persamaan regresi yang dipakai dalam penelitian ini.

Tabel 3. Uji Hipotesis

	1	2	3
DP	0.0407 (2.0552)		0.0456* (2.0069)
GENDER		0.0457 (2.0056)	0.0129* (2.4993)
SIZE	0.0314 (2.1613)	0.0398 (2.0637)	0.0496* (1.9707)
BEL	0.3343 (-0.9668)	0.4188 (-0.8095)	0.2798 (-1.0826)
TKD	0.6408 (0.4671)	0.3732 (0.8917)	0.4109 (0.8233)
Prob (F-Statistic)	0.0425	0.0385	0.0115

Adjusted R² 0.0177 0.0186 0.0295

Ket:

*Signifikansi 5%

KP = Kinerja Pemerintah Daerah Skor EKPPD; DP = Dukungan Politik, jumlah anggota dewan pendukung dibagi dengan total jumlah anggota dewan; GENDER = Gender Kepala Daerah, SIZE = Ukuran Pemerintah Daerah, In dari total aset; Bel = Belanja Modal, skala antara jumlah belanja modal dan total belanja; TKD = Tingkat Kekayaan Daerah, skala antara PAD dan total pendapatan.

Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3 penelitian ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,011 untuk nilai Prob(F-Statistic) yang berarti jauh di bawah $\alpha = 0,05$. Dimana dapat diartikan bahwa model regresi yang variabel dependen dipengaruhi variabel independen secara simultan.

Dukungan partai politik (DP) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah karena memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0456 (di bawah $\alpha = 0,05$) dan nilai t positif. Hal ini menegaskan bahwa hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini diterima. Gender kepala daerah (GENDER) memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah karena memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0129 (di bawah $\alpha = 0,05$). Hal ini menegaskan bahwa hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima.

Penelitian ini juga melakukan analisis tambahan yang dilakukan pada daerah non pemekaran di Pulau Jawa, dengan hasil analisis yang ditunjukkan pada Tabel 4. Menurut hasil regresi pada Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa gender dan dukungan politik pada non-daerah pemekaran pulau jawa memiliki hasil yang serupa pada hasil regresi di seluruh pulau jawa yang mana dukungan politik serta gender kepala daerah pengaruh terhadap kinerja daerah. Untuk variabel kontrol juga memiliki hasil yang konsisten dimana ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja daerah. Sedangkan untuk tingkat kekayaan daerah dan belanja modal tidak mempengaruhi terhadap kinerja daerah. Hal ini disebabkan karena Daerah non pemekaran dengan daerah lain di pulau jawa mungkin memiliki struktur pemerintahan dan politik yang serupa. Hal ini dapat menyebabkan kesamaan dalam pola hubungan antara gender, dukungan politik, dan kinerja daerah.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Daerah Non-Pemekaran di Pulau Jawa

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DP	0.1142	0.0579	1.9708	0,0497
GENDER	0.0602	0.0294	2.0507	0,0412
SIZE	0.0433	0.0157	2.7499	0,0063
BEL	-0.2335	0.2305	-1.0128	0,3120
TKD	0.0042	0.1435	0.0293	0,9766
F Value				0.0091
Adjusted R ²	0.0353			

Ket: KP = Kinerja Pemerintah Daerah Skor EKPPD; DP = Dukungan Politik, jumlah anggota dewan pendukung dibagi dengan total jumlah anggota dewan; GENDER = Gender Kepala Daerah, SIZE = Ukuran Pemerintah Daerah, In dari total aset; Bel = Belanja Modal, skala antara jumlah belanja modal dan total belanja; TKD = Tingkat Kekayaan Daerah, skala antara PAD dan total pendapatan.

Pembahasan

Pengaruh Dukungan Politik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan dari Tabel 3. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu oleh Yudistira & Rohman (2022) dan Del Sol (2013), yang juga menunjukkan pengaruh positif dukungan politik terhadap kinerja pemerintahan daerah. Ketika seorang kepala daerah memiliki dukungan politik mayoritas biasanya melakukan pengungkapan akan lebih terpacu untuk menghasilkan yang terbaik. Hal ini disebabkan karena untuk mengurangi pengawasan dari saingan politiknya karena biasanya lawan politik akan lebih kritis dalam melakukan pengawasan, ketika seorang kepala daerah mampu mencetak kinerja yang baik maka akan memperoleh nilai positif dari masyarakat dan berpeluang untuk terpilih lagi di periode selanjutnya. Begitu pula sebaliknya ketika kepala daerah terpilih dari partai minoritas maka akan muncul tekanan dari lawan politik sehingga memacu untuk melakukan pengungkapan secara keseluruhan terkait ke pemerintahannya dengan baik (Tavares & da Cruz, 2017). Penelitian yang dilakukan di Ghana (Krah & Metens, 2020) menyebutkan bahwa ketika sebuah pemerintah daerah memiliki dukungan politik dan mampu memberikan transparansi yang baik maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mengurangi resiko korupsi. Dukungan politik yang kuat dari DPRD dapat membantu pemda dalam mencapai kinerja yang lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerapan SAP yang efektif dapat menjadi alat yang penting untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam konteks dukungan politik yang kuat. Dengan penerapan SAP yang efektif, pemda dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membangun tata kelola keuangan yang lebih baik.

Pengaruh Gender terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Untuk variabel gender kepala daerah juga menunjukkan hasil yang linier, dimana gender kepala daerah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah Hal ini mengindikasikan bahwa kepala daerah perempuan sendiri tidak bisa dipandang sebelah mata mereka juga memiliki kinerja yang baik tidak kalah dengan kepala daerah laki-laki. Hal ini sepaham dengan penelitian (Fereira dan Gyourko, 2014) yang menyebutkan bahwa walikota di Amerika Serikat yang memiliki gender perempuan memiliki keterampilan politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian penelitian (Park, 2012) yang menjelaskan bahwa dengan adanya keberadaan perempuan di birokrasi Korea Selatan juga memiliki pengaruh positif terhadap kinerja. Dapat disimpulkan bahwa adanya diversitas gender dalam lingkungan birokrasi dapat memberikan suasana baru serta sudut pandang baru sehingga dapat meningkatkan kinerja. Di Malaysia (Doraisami, 2012) menjelaskan mencapai kesetaraan gender bukan hanya tugas moral, tetapi juga kunci untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Kinerja sebuah organisasi akan meningkat dengan adanya keberadaan Wanita didalamnya (Pahlevi & Setiawan, 2017). Penelitian ini tidak sejalan dengan (Terjesen et al., 2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa gender tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kepemimpinan perempuan dapat mendorong penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang lebih efektif, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemda.

Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah (SIZE) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah karena memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0496 (di bawah $\alpha = 0,05$) dan nilai t positif. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan daerah yang baik maka ukuran pemerintah daerah semakin luas. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran luas dapat mempermudah dalam memberikan layanan masyarakat yang sesuai, luasnya ukuran daerah yang dimiliki juga mampu meningkatkan pendapatan daerah serta majunya daerah itu sendiri. Ketika sebuah pemerintah

daerah memiliki daerah yang luas maka pemerintah tersebut akan mendapatkan perhatian ekstra dari publik untuk melakukan pengungkapan (Marfiana & Kurniasih, 2013). Ketika pemerintah mendapatkan perhatian lebih dari publik dalam melakukan pengungkapan maka hal ini akan berimbas pada kinerja yang dihasilkan pula. Pemerintah daerah akan lebih termotivasi untuk mengungkapkan kabar baik ketika mereka mengungkapkan laporan kerjanya. Kabar baik dapat berupa laporan tentang kinerja yang bagus. Hasil ini sesuai dengan (Firmansyah, 2020), (Winarna et al., 2017), (Hardiningsih et al., 2019), (Aziz, 2016), (Khasanah & Rahardjo, 2014).

Belanja modal (Bel) tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah karena memiliki nilai probabilitas sebesar 0,2798 (di atas $\alpha = 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan daerah yang baik tidak dipengaruhi alokasi belanja modal. Dikarenakan manfaat belanja modal itu sendiri tidak dapat langsung dirasakan melainkan membutuhkan lebih dari satu periode akuntansi, dengan kata lain pemerintah daerah lebih memilih untuk membelanjakan uang untuk pengeluaran lain yang memberikan hasil cepat. Belanja modal sendiri merupakan anggaran yang diperuntukan untuk membeli aset tetap dengan manfaat jangka panjang, seperti pembangunan jalan, infrastruktur, jembatan, serta pembebasan lahan untuk proyek-proyek daerah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya belanja modal ini manfaat yang diberikan atau yang akan diperoleh oleh pemerintah daerah baru bisa diperoleh di masa yang akan datang (Nugroho & Prasetyo, 2018), dengan demikian manfaatnya tidak dapat dirasakan langsung terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini memiliki pendapat yang sama dengan (Sudarsana & Raharjo, 2013), (Suryaningsih & Sisdyani, 2016) dimana belanja modal dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh. Serta penelitian yang dilakukan (Pratiwi & Aryani, 2016) berpendapat bahwa semakin tingginya pengeluaran belanja daerah memiliki dampak negatif terhadap opini BPK dalam laporan keuangan daerah. Dapat diartikan apabila sebuah daerah melakukan transaksi belanja daerah yang besar maka semakin kompleks pula proses dimana probabilitas sebuah daerah mendapatkan opini audit WTP semakin kecil. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan (Harumiati & Payamta, 2014).

Tingkat kekayaan daerah (TKD) tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah karena memiliki nilai probabilitas sebesar 0,4109 (di atas $\alpha = 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kekayaan daerah belum mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini dibuktikan bahwa di Pulau Jawa sendiri pada Tahun 2016-2018 rata-rata tingkat kekayaan daerah hanya sebesar 19%. Hal ini disebabkan masih kecilnya proporsi pendapatan asli daerah dalam pendapatan daerah dimana masih banyak daerah yang membutuhkan bantuan dari pusat. Kecilnya perolehan Pendapatan Asli Daerah ini disebabkan karena pemerintah daerah sendiri mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi potensi sumber PAD sehingga menyebabkan tingginya tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat. Hasil penelitian ini memiliki pendapat yang sama dengan penelitian yg dilakukan (Noviyanti & Kiswanto, 2016), hal ini juga disebabkan karena masih banyaknya daerah di Pulau Jawa yang porsi ketergantungan atas transfer dana dari pemerintah pusat masih tinggi.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka rekomendasi hasil penelitian ini, yaitu meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Dorong partisipasi perempuan dalam politik melalui program edukasi, pelatihan, dan pendanaan untuk memperkuat kapasitas perempuan dalam kepemimpinan politik

Kebijakan

Berdasarkan hasil dan interpretasi penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai rekomendasi kebijakan antara lain:

1. Pendidikan Politik Perempuan
Adakan program pendidikan politik khusus perempuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam politik dan kebijakan publik.
2. Kuota Gender
Implementasikan kebijakan kuota gender untuk meningkatkan representasi perempuan dalam DPRD dan struktur pemerintahan lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dana dari LPPM Universitas Sebelas Maret, melalui Hibah Riset Grup No. 194.2/UN27.22/PT.01.03/2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Araujo, J. F. F. E. D., & Tejedo-Romero, F. (2016). Local Government Transparency Index: Determinants of Municipalities' Rankings. *International Journal of Public Sector Management*, 29(4), 327-347.
- Araujo, J. F. F. E., & Tejedo-Romero, F. (2018). Does Gender Equality Affect Municipal Transparency: The Case of Spain. *Public Performance & Management Review*, 41(1), 69-99.
- Aziz, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 11(1).
- Azzahra, A. S., & Wibowo, N. (2019). Pengaruh Firm Size dan Leverage Ratio terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 9(1), 13-20.
- Biduri, S., & Dewi, S. R. (2022). The Urgency of Implementing Gender Responsive Budgets in Local Governments (Study in Sidoarjo Regency). *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 3, 1394-1403.
- Chattopadhyay, Raghendra, Duflo, Esther, (2004). Women as Policy Makers: Evidence From A Randomized Policy Experiment in India. *Econometrica*, 72 (5), 1409–1443.
- Cohen, S., & Leventis, S. (2013, March). Effects of Municipal, Auditing and Political Factors on Audit Delay. *In Accounting Forum* (Vol. 37, No. 1, pp. 40-53).
- Del Sol, D. A. (2013). The Institutional, Economic, and Social Determinants of Local Government Transparency. *Journal of Economic Policy Reform*, 16(1), 90–107.
- Dewi, K. H. (2012). Female Leadership and Democratization in Local Politics since 2005: Trend, Prospect, and Reflection in Indonesia. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 38(2), 329–349.
- Doraisami, A. (2012). The Gender Implications of Macroeconomic Policy and Performance in Malaysia. *In Social Justice And Gender Equality*, (pp. 187-212). Routledge.
- Ellwood, S., & Garcia-Lacalle, J. (2015). The Influence of Presence and Position of Women on the Boards of Directors: The Case of NHS Foundation Trusts. *Journal of Business Ethics*, 130(1), 69-84.
- Ferreira, F., & Gyourko, J. (2014). Does Gender Matter for Political Leadership? The Case of U.S. Mayors. *Journal of Public Economics*, 112, 24–39.
- Finkelstein, Sydney, and Donald C. Hambrick. (1990). Top-Management-Team Tenure and Organizational Outcomes: The Moderating Role of Managerial Discretion. *Administrative Science Quarterly*.

- Firmansyah, A. (2020). Determinants of Transparency in Financial Management on Local Government Websites: Evidence from Indonesia. *Humanities and Social Sciences Letters*, 8(2), 145-155.
- Greiling, D. (2005). Performance Measurement in the Public Sector: The German Experience. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 54(7): 551-567.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53-64.
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper Echelons: The Organization as A Reflection of Its Top Managers. *Academy of Management Review*, 9(2), 193-206.
- Hardiningsih, P., Januarti, I., Srimindarti, C., & Oktaviani, R. M. (2019). Does the Characteristics of Regional Government and Complexity Affect on the Disclosure Regional Financial Statements?. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 106-116.
- Harumiati, Y., & Payamta, P. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2011. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 3(2), 84-96.
- Heriningsih, S., & Marita, M. (2013). Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa). *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 67-78.
- Huang, S. K. (2013). The Impact of CEO Characteristics on Corporate Sustainable Development. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 20(4), 234-244.
- Islamy, M.Irfan. (2000). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Khasanah & Rahardjo. (2014). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 864-874.
- Krah, R., & Mertens, G. (2020). Democracy and Financial Transparency of Local Governments in Sub-Saharan Africa. *Meditari Accountancy Research*, 28(4), 681-699.
- Lam, K. C., McGuinness, P. B., & Vieito, J. P. (2013). CEO Gender, Executive Compensation, and Firm Performance in Chinese-Listed Enterprises. *Pacific-Basin Finance Journal*, 21(1), 1136-1159.
- Liu, Y., Wei, Z., & Xie, F. (2014). Do Women Directors Improve Firm Performance in China?. *Journal of Corporate Finance*, 28(Supplement C), 169-184.
- Mahardika, T. R. (2023). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah Terhadap Keberhasilan Penerapan Program Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (*Doctoral dissertation*, Universitas Gadjah Mada).
- Marfiana, N dan Kurniasih, L. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 3(1).
- Meyers-Levy, J., & Maheswaran, D. (1991). Exploring Differences in Males' and Females' Processing Strategies. *Journal of Consumer Research*, 18(1), 63-70.
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto, K. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1).
- Nugroho, T. R., & Prasetyo, N. E. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7(1), 27-34.

- Pahlevi, A. R., & Setiawan, D. (2017). Apakah Karakteristik Kepala Daerah Berdampak terhadap Kinerja Pemerintahan?. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 571-582.
- Park, S. (2012). Does Gender Matter? The Effect of Gender Representation of Public Bureaucracy on Governmental Performance. *The American Review of Public Administration*, 43(2), 221-242.
- Peni, E. (2014). CEO and Chairperson Characteristics and Firm Performance. *Journal of Management & Governance*, 18(1), 185-205.
- Pratiwi, R., & Aryani, Y. A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit terhadap Opini. *Jurnal Akuntansi*, 20(2), 167-189.
- Putri, Y. M. (2018). Pengaruh Dukungan Politik, Pendapatan Daerah, Periode Jabatan dan Belanja Daerah terhadap Budget Forecast Errors Pemerintah Daerah di Sumatera. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Qoriiba, F., & Aswar, K. (2021). Antecedents of Regional Financial Independence: A Moderating Effect of Capital Expenditure at Local Government Level in Indonesia. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 13(4 (J)), 41-49.
- Sitepu, B. (2016). Analisis Anggaran Pemerintah (APBN dan APBN-P) dalam Perspektif Demokrasi Multipartai dan Koalisi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 17(1), 28-43.
- Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Bpk terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/kota di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting*, 175-187.
- Suryaningsih, N. M., & Sisdyani, E. A. (2016). Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2), 1453-1481.
- Tavares, A. F., & da Cruz, N. F. (2017). Explaining the Transparency of Local Government Websites through A Political Market Framework. *Government Information Quarterly*, December 2018.
- Terjesen, S., Couto, E. B., & Francisco, P. M. (2016). Does the Presence of Independent and Female Directors Impact Firm Performance? A Multi-Country Study of Board Diversity. *Journal of Management & Governance*, 20(3), 447-483.
- Walker, R. M., & Andrews, R. (2015). Local Government Management and Performance: A Review of Evidence. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 25(1), 101-133.
- Widagdo, A. K., & Munir, M. B. (2017). Profil Kepala Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(2), 303-330.
- Widyaningrum, W., Setiawan, D., & Brahmana, R. K. (2019). Factors Affecting Rebudgeting in Local Government: From Organizational Feature to Political Variables. *International Journal of Economics and Management*, 13(1), 139-152.
- Winarna, J., Widagdo, A. K., & Setiawan, D. (2017). Financial Distress of Local Government: A Study on Local Government Characteristics, Infrastructure, and Financial Condition. *Global Business & Finance Review (GBFR)*, 22(2), 34-47.
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo: Yogyakarta.
- Yudistira, Y., & Rohman, A. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Pemerintah Daerah (Studi pada LKPD di Indonesia Tahun Anggaran 2018 dan 2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1).
- Zimmerman, J. L. 1977. The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. *Journal of Accounting Research*.